



{Media Sosial}

ANALISIS BUDAYA

ARIEL HERYANTO

Profesor Emeritus
dari Universitas Monash, Australia



Teknologi digital berkembang dengan kecepatan tinggi. Yang semula terbelang ajaib atau elitis, kini jadi kebutuhan sehari-hari. Ada yang jadi mainan anak-anak. Tak lama lagi semuanya jadi basi. Mungkin *artificial intelligence* (AI) akan bernasib serupa.

Pada tahun 1994 Harian *Kompas* menerbitkan laporan berjudul "Telepon Genggam: Gengsi atau Kebutuhan?". Kini tanpa telepon genggam, akan sulit bagi warga kota mengakses jasa kesehatan atau hiburan. Sulit membeli tiket konser, mendaftar sekolah, melamar kerja, dan berteman. Di sejumlah tempat, makanan hanya bisa dipesan dan dibayar secara daring. Sebagian birokrasi negara dan lembaga swasta hanya melayani warga dengan identitas berwujud nomor telepon.

Tak perlu berdebat apakah perubahan itu berkah atau bencana. Tidak ada ukuran baik/buruk yang netral, seragam, dan berlaku universal. Lagi pula perubahan itu seperti takdir. Tak bisa dipilih atau dihindari. Kita tidak memilih lahir kapan atau di mana. Kita juga tidak berdaya menghadapi arus kehidupan yang didikte teknologi.

Jasa teknologi digital sulit disangkal. Begitu juga dampak terburuknya. Ada kebutuhan timbal-balik di antara produsen teknologi dan massa konsumen. Tetapi, hubungan mereka tidak setara. Desain dan produksi teknologi mutakhir dikendalikan sekelompok kecil elite. Cepat atau lambat sebagian besar penduduk dunia menjadi konsumen produk mereka. Slogan "konsumen adalah raja" menyesatkan.

Sejumlah negara mewajibkan perusahaan media sosial membatasi akses remaja. Langkah itu terpuji, tetapi ibarat melawan arus. Selalu akan ada celah untuk menembus pembatasan itu. Dampak terburuk teknologi digital bisa diredam sebagian atau sementara, tetapi tidak dilenyapkan total. Mirip pembatasan rokok, minuman beralkohol, atau pornografi.

Yang rentan terdampak buruk media sosial bukan hanya remaja. Penipuan, disinformasi, atau perundungan digital

(Bersambung ke hlm 15 kol 6-7)

(Sambungan dari halaman 1)

memakan korban lintas usia. Tidak mudah membatasi akses media sosial untuk remaja, apalagi pada orang dewasa. Norma sosial masa kini kurang mendukung pembatasan begitu karena meluasnya pandangan ber-corak liberal.

Dalam pandangan liberal, setiap orang dewasa diasumsikan bisa berpikir dan rasional. Ia diasumsikan sadar, berhak, dan bertanggung jawab menentukan sendiri apa yang terbaik bagi dirinya tanpa merugikan orang lain. Liberalisme menuntut kebebasan individual itu dihormati dan dilindungi negara.

Gagasan liberal semacam itu melandasi popularitas tradisi pemungutan suara. Tradisi itu dipraktikkan dari remeh-temeh menentukan acara keluarga hingga pemilihan umum (pemilu) untuk menetapkan kepala negara. Semua praktik lazim itu dinilai bersemangat demokratis.

Secara umum, Indonesia tidak memuliakan liberalisme secara politik, apalagi urusan seksualitas dan agama. Tetapi, di negeri nonliberal ini pun secara formal demokrasi dinilai positif. Pemilu terukir dalam konstitusi. Padahal, asumsi yang mendasari wawasan liberal dan demokrasi itu bermasalah.

Benarkah jika diberi kebebasan, orang dewasa akan otomatis bersikap rasional? Apakah suara mayoritas dalam pemilu lebih rasional ketimbang yang minoritas? Belakangan ini warga di sejumlah negara menyatakan sesal karena merasa telah salah pilih dalam pemilu terdahulu. Untuk memenangi pemilu, politikus tidak dituntut bersikap rasional. Yang menang adalah yang paling populer. Maka, populisme jadi marak di mana-mana.

Kita menikmati jasa media digital dan ikut terkena dampak buruknya. Setiap *posting*, setiap klik, emoji, atau komentar dari pengguna media sosial memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan media itu. Berkat dukungan pengguna, para juragan media sosial masuk daftar orang terkaya di dunia.

Di luar masalah finansial, ada soal lain yang lebih serius. Dua abad lalu, jika rakyat merasa tertindas raja zalim, mereka bisa memilih kabur menjauh atau pindah ke wilayah kerajaan lain. Peluang itu berkurang di awal abad ke-20. Berkat teknologi dan birokrasi modern, negara lebih mampu mengontrol ruang publik dan membatasi mobilitas rakyat. Kini perusahaan media sosial mengungguli negara abad ke-20 dalam satu hal. Mereka menyimpan data pribadi dalam volume besar tentang identitas, mobilitas, dan selera nyaris separuh penduduk dunia.

Data pribadi itu membantu operasi perusahaan media dengan mengarahkan rutinitas dan perhatian pengguna. Jika komunitas media sosial diibaratkan sebuah bangsa, mereka mirip warga di negara berpenduduk lebih besar daripada negara mana pun di dunia. Komunitas digital raksasa itu dikuasai segelintir orang tanpa pemilu untuk berkuasa tanpa batas masa jabatan. Mereka bukan penguasa negara berdaulat, tetapi operasi teknologi mereka sangat menentukan hasil pemilu di banyak negara, dengan atau tanpa restu elite setempat.

Kontrol atas data pribadi digital tidak dimonopoli perusahaan media sosial semata. Lembaga negara dan swasta ikut memiliki sebagian data pribadi warganya. Dalam skala mikro, secara individual kita menyimpan data pribadi sahabat dan kerabat. Semua pihak bertanggung jawab atas perlindungan, keamanan, dan penyimpanan data itu. Perlindungan demikian sudah diatur hukum. Tetapi, aturan resmi tidak menjamin kualitas pelaksanaannya.

Tanpa perlindungan itu, tidak ada yang diadili dan dihukum pidana jika data pribadi yang disimpan lembaga negara atau swasta bocor atau tercuri. Akun media sosial warga tiba-tiba tidak bisa diakses setelah pemiliknya bersuara kritis terhadap kebijakan pemerintah. Telepon kita dibanjiri pesan iklan bertubi-tubi dari aneka usaha dagang yang tidak pernah kita kontak. Tanpa persetujuan kita, nomor telepon atau WA kita bisa dibocorkan teman sendiri kepada pihak lain.

Derap sejarah dan teknologi ibarat takdir. Tidak dapat ditolak. Tetapi, takdir tidak hanya berisi bencana bila dampak terburuknya kita redam sejak dini dan jasa terbaiknya kita rawat. Yang perlu dilindungi bukan hanya remaja. Yang perlu dipantau bukan cuma konten bermasalah atau algoritma. Dibutuhkan perlindungan data pribadi oleh semua pihak, dari tingkat global hingga tingkat individual, dengan hukum, adab, dan etika.